

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SMPN 27 Semarang

SMPN 27 Semarang beralamat di Ngesrep Timur Raya VI No 4, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Telpn 024-7471253 dan e-mail: smp27smg@yahoo.co.id.

SMPN berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang didirikan dengan No. SK. Pendirian 059/0/1985 tanggal 22 November 1985. Selanjutnya beroperasi dengan dasar No. SK. Operasional 059/0/1985 tanggal 22 November 1985. Jadi, sekolah ini berdiri dan beroperasi pada hari dan tanggal yang sama.

Sekolah ini memiliki akreditasi A dengan No. SK. Akreditasi 905/BAN-SM/SK/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

a. Visi dan Misi

Sekolah ini memiliki visi “Unggul Dalam Prestasi Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Imam dan Taqwa (Imtaq)”. Misi sekolah ini adalah:

- 1) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Kelulusan
- 2) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Isi Kurikulum KTSP
- 3) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Proses Pembelajaran dengan Pendekatan CTL

- 4) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- 5) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 6) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Pengelolaan Berbasis Sekolah
- 7) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Pembiayaan Pendidikan
- 8) Meningkatkan dan Mengembangkan Standar Penilaian Pendidikan
- 9) Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan Olah Raga dan Seni
- 10) Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan Budaya dan Keagamaan

b. Prestasi

Prestasi yang dicapai oleh SMPN 27 Semarang Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prestasi SMPN 27 Semarang

No	Tahun	Prestasi
1	2017	Juara 2 Futsal Semarak SMA Teuku Umar
2	2017	Juara 3 Taekwondo Tingkat Pelajar Nasional
3	2018	Juara 2 Kejuaraan Nasional Taekwondo Piala KAPOLRES Semarang Ke-II
4	2018	Juara 2 Under 49 kg Cadet Putra "WE ONE BTI-AAU Taekwondo Championship 2018 Trophy bergilir Gubernur Akademi Angkatan Udara Ke 1
5	2018	Juara 2 60 Kg Junior Putri Kejuaraan Wushu Sanda Pelajar Jawa Tengah Piala Walikota Semarang
6	2019	Juara 3 Futsal Al-Azhar Cup
7	2019	Juara 1 Futsal Teuku Umar Cup Tingkat Kota Semarang

Sumber: SMPN 27 Semarang

c. Sumber Daya Manusia

Sekolah ini memiliki guru sebanyak 37 orang, dimana 86,49% berstatus PNS dan 13,51% non-PNS/ honorer. Guru yang memenuhi kualifikasi 91,89% dan guru sertifikasi 89,19%.

d. Siswa

Jumlah siswa sebanyak 790 orang yang terdiri dari 391 orang laki-laki dan 399 orang perempuan. Siswa tersebut terbagi dalam 24 rombongan belajar. Rata-rata jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar sekitar 30 orang.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ini terdiri dari ruang kelas (24 ruang dengan kondisi baik), laboratorium (3 ruang), perpustakaan (1 ruang), serta sanitasi siswa (2 ruang) dan sanitasi guru (2 ruang). Sarana dan prasarana yang memiliki kondisi baik adalah laboratorium komputer, perpustakaan dan sanitasi guru; sedangkan dalam kondisi rusak ringan adalah laboratorium IPA dan bahasa, serta sanitasi siswa. Khusus untuk ruang kelas terdapat 6 ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan.

Sarana dan prasarana lain yang dimiliki SMPN 27 Semarang adalah lapangan basket, lapangan bola volly, lapangan futsal, lapangan lompat jauh, masjid, ruang BK, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang keterampilan, ruang koperasi, ruang OSIS, ruang TU dan ruang UKS.

f. **Kurikulum**

Kurikulum yang diterapkan di SMPN 27 Semarang adalah Kurikulum 2013, dimana kurikulum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam diri siswa sehingga tidak hanya wawasannya saja yang bertambah, tetapi juga mampu mengembangkan karakter dan kepribadian yang mulia atau memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini seperti yang dijabarkan dalam Pasal 2 dari peraturan tersebut bahwa terdapat 2 (dua) kompetensi yang ingin dicapai dari kurikulum 2013, yaitu (1) Kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini terdiri dari inti sikap spiritual, inti sikap sosial, inti pengetahuan, dan inti keterampilan; dan (2) Kompetensi dasar, yaitu kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

g. Kegiatan Belajar Mengajar

Secara umum SMPN 27 Semarang menyelenggarakan Sekolah Lima Hari (delapan jam per hari), dengan tiga kegiatan utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran seperti yang telah berjalan, dengan lama waktu belajar 4 – 5 jam pelajaran. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, dengan lama waktu belajar 2 jam dalam bentuk proyek mandiri (otonomi siswa), kolaboratif, dan pengalaman dunia nyata. Misal: tugas-tugas yang diberikan oleh guru terkait mata pelajaran tertentu yang dikerjakan di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, dengan lama waktu kegiatan 1-2 jam.

2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 27 Semarang Tahun Ajaran (TA) 2019/2020

a. Dasar Pelaksanaan PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 27 Semarang pada tahun ajaran 2019/2020 didasarkan pada Permendikbud 51/2018. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Zonasi sekolah untuk 2019/2020 mengacu pada Permendikbud 51/2018 dan Perwalkot 15/2019. Perwalkot ini mengatur rinci pelaksanaan sistem zonasi, seperti maksud dan tujuan,

penyelenggaraan dan tata caranya, seleksi dan kriteria penerimaan siswa, pengaduan³⁴.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Indartik selaku Guru SMPN 27 Semarang yang juga menjadi panitia PPDB sebagai berikut: “semua yang berkaitan dengan PPDB semuanya mengacu pada permendikbud yang berlaku”³⁵. Sabarudin Hulu selaku Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah juga mengatakan: “Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 telah mengatur jalur pelaksanaan penerimaan siswa didik yaitu 90% melalui jalur zonasi, 5% prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua”³⁶.

Selanjutnya walikota Semarang juga menetapkan pemberian kemudahan bagi peserta didik, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

Bapak Walikota Semarang melalui SK memberikan kemudahan bagi calon peserta didik, dengan kriteria:

1. Peserta didik prestasi berjenjang. Peserta didik dari dalam zona dan luar zona yang memiliki prestasi juara 1, 2, 3 jenjang nasional dan internasional akan langsung diterima.
2. Peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orangtua/ wali ke daerah dan/atau dikarenakan bencana alam/ sosial akan langsung diterima dan maksimal 5%
3. Peserta didik anak guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat orangtuanya bertugas sebagai guru akan langsung diterima bila kuota 5% luar zonasi tidak

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

³⁶ Unit Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, 2019, Ombudsman Jateng Awasi PPDB Tingkat SMP di Kota Semarang, Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-jateng-awasi-ppdb-tingkat-smp-di-kota-semarang-zonasi-untuk-pemerataan-pendidikan>

terpenuhi. Apabila kuota luar zona terpenuhi, maka anak guru mengikuti seleksi umum

4. Peserta didik berkebutuhan khusus dari dalam zona akan langsung diterima
5. Tambahan nilai lingkungan 3 bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan dan tambahan nilai lingkungan 2 yang bertempat tinggal disekitar satuan pendidikan
6. Nilai prestasi tidak berjenjang yang diakui akan mendapatkan tambahan nilai adalah tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan untuk juara I, II, dan III³⁷.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, maka dasar penerimaan PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Permendikbud 51/2018.

b. Daerah Zona pada PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

Pasal 1 Butir 20 Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019, menjelaskan zonasi sebagai berikut:

Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah di Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.

Penetapan zonasi dilakukan oleh pemerintah kota dengan mempertimbangkan luas dan banyaknya wilayah zonasi yang ada di wilayah administrasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memetakan jumlah dan domisili calon peserta didik baru, daya tampung sekolah, dan jumlah sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang akan disertakan dan sekolah yang berbasis agama. Pernyataan ini

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Penetapan zonasi oleh Pemkot, sebagaimana yang ada dalam perwalkot. Pak Walikota menetapkan daerah zonasi dengan mendengarkan usulan banyak pihak, Dinas Pendidikan, Sekolah, Kecamatan dan Kelurahan. Benar-benar mempertimbangkan jumlah calon peserta didik, daya tampung, dan sekolah swasta yang ada. Penetapan daerah zonasi ini memang mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga efisien dan efektif dan akhirnya terjadi peningkatan akses pendidikan³⁸.

Wilayah zona di SMPN 27 Semarang adalah Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Ngesrep, Padangsari, Pedalangan, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Sumurbroto, Tinjomoyo, Jatingaleh, Bulusan, Jangli, Kramas, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, dan Tembalang³⁹. Calon peserta didik baru dengan Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di kedelapan belas kelurahan ini dan minimal telah tinggal di alamat tersebut 6 (enam) bulan sebelum PPDB, dinyatakan sebagai calon peserta didik yang berasal dari dalam zona. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 sebagai berikut:

Bukti kalau alamat kita masuk zona pakai KK mas dan kita mesti tinggal di alamat ini 6 bulan paling sedikit. Kalau alamat KK beda sama alamat tinggal bisa pakai SKD dari RT, RW, kelurahan yang menyatakan benar-benar tinggal di alamat itu. Sama juga sedikitnya telah tinggal 6 bulan⁴⁰.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

³⁹ <https://ppd.semarangkota.go.id/smp>

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Pas daftar untuk buktikan alamat kita termasuk zona menggunakan KK. Sama KK itu menunjukkan kalau kita sudah tinggal lama di alamat tersebut. Maksudnya lama, kita sudah tinggal di alamat itu paling sedikit 6 bulan⁴¹.

Berdasarkan penjabaran di atas maka SMPN 27 Semarang mencakup 18 (delapan belas) kelurahan yang termasuk dalam daerah zona, yang ditetapkan oleh walikota Semarang. Bukti bahwa calon PPDB tinggal di daerah zona SMPN 27 Semarang adalah KK atau SKD dengan lama tinggal di alamat tersebut minimal 6 (enam) bulan.

c. Target PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

Target PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 ditetapkan sesuai dengan daya tampung menurut SK Walikota Semarang 420/404 Tahun 2019, di mana daya tampung SMPN 27 Semarang adalah 256 orang dengan jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 32 orang. Jadi, SMPN 27 Semarang memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 8 (delapan). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut: “Target PPDB di Kota Semarang mengacu pada daya tampung sekolah yang ditetapkan SK Walikota”⁴². Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:
“Kami menetapkan target PPDB mengacu pada daya tampung sekolah yang ditetapkan oleh Bapak Walikota”⁴³.

Rincian target PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 adalah dalam zona (DZ) sebesar 231 orang (90%) dan luar zona (LN) sebesar 25 orang (10%). Target yang ditetapkan ini tercapai, yaitu:

1) Dalam Zona

Menerima siswa yang berasal dari dalam zona 1 (Z1) sebanyak 253 orang (98,83%) dengan Nilai Akhir Peringkat (NAP) minimal 76,10. Hal ini berarti penerimaan siswa di SMPN 27 Semarang yang berasal dari dalam zona, tidak ada yang berasal dari zona 2 (Z2), jalur prestasi, atau inklusi.

2) Luar Zona

Menerima siswa yang berasal dari jalur mutasi sebanyak 3 orang (1,17%) dengan NAP minimal 23,23.

Segi lain, SMPN 27 Semarang tidak menerima 90 orang calon peserta didik meskipun berasal dari dalam zona, yang disebabkan jumlah kuota sudah terpenuhi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang sebagai berikut:

Memang ada calon murid yang tidak diterima meski berasal dari dalam zona, karena kuota sudah terpenuhi. Dasar kami menolak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 1. Jarak, 2.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

Usia, 3. Pilihan pertama, 4. NAP, dan 5. Nomor urut saat daftar⁴⁴.

Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menyatakan adanya calon murid yang tidak diterima karena NAP tidak lolos kriteria. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Teman anak saya, Agnes tidak diterima di SMP 27 karena nilainya nggak masuk, memang rendah sih. Padahal tinggalnya dalam zona, ya akhirnya anaknya masuk swasta”⁴⁵.

Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan adanya calon murid yang tidak diterima, karena faktor umur. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Sepertinya banyak juga anak yang tidak diterima di sekolah ini. Teman anak saya yang SD nggak lolos karena faktor umur. Tinggalnya dalam zona dan nilainya juga tinggi, namun ya itu umurnya masih mudah, kalau tidak salah umurnya 14 tahun. Terus anaknya masuk di Yohanes⁴⁶.

d. Alur Pendaftaran PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

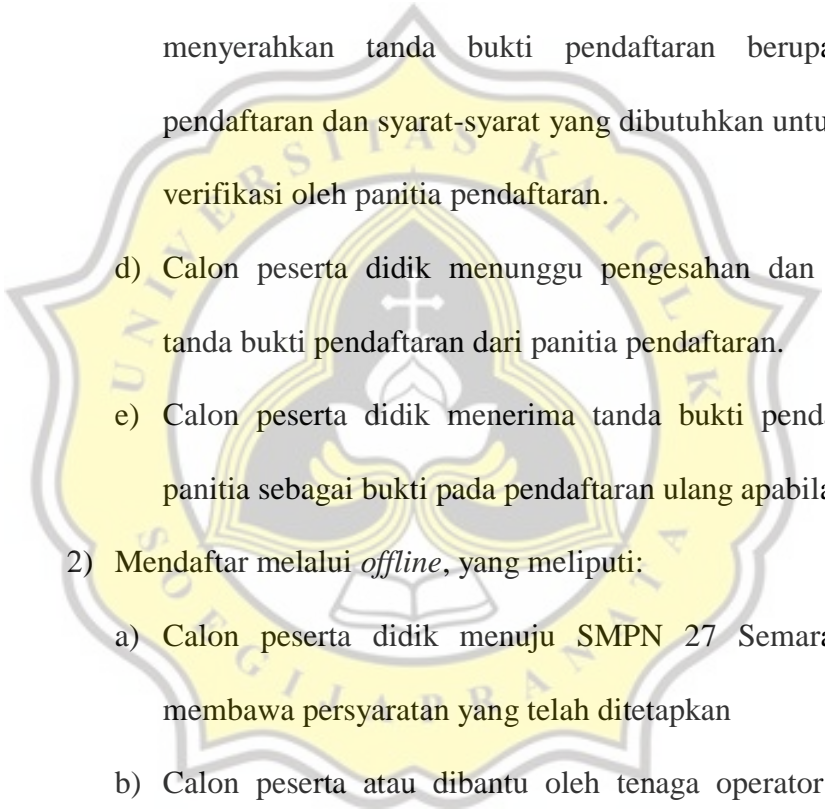
Pendaftaran PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan), yang dilaksanakan dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1) Mendaftar melalui *online*, yang meliputi:

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

- 
- a) Calon peserta didik membuka situs internet PPDB Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran.
<https://ppd.semarangkota.go.id/smp>
 - b) Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet.
 - c) Calon peserta didik datang ke SMPN 27 Semarang dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran.
 - d) Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran.
 - e) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- 2) Mendaftar melalui *offline*, yang meliputi:
- a) Calon peserta didik menuju SMPN 27 Semarang dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan
 - b) Calon peserta atau dibantu oleh tenaga operator melakukan proses *entry* data formulir pendaftaran melalui komputer secara *online* yang disediakan oleh panitia, sedangkan calon yang pendaftarannya tidak melalui *online* mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia

- c) Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran
- d) Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari panitia
- e) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima

Pendaftaran PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 secara daring ini diharapkan beberapa keuntungan baik bagi masyarakat, dinas pendidikan dan sekolah. PPDB daring bagi masyarakat (1) layanan PPDB yang lebih tertib dan lancar, (2) proses PPDB sesuai aturan berlaku sehingga lebih adil, transparan dan akuntabel, (3) turut aktif memantau proses pelaksanaan PPDB dengan lebih mudah dan cepat, dan (4) dapat diakses 24 jam darimana saja melalui internet, SMS, dan perangkat seluler lainnya. Sementara bagi Dinas Pendidikan dan sekolah (1) pelayanan publik PPDB yang prima kepada masyarakat, (2) penyelenggaraan PPDB lebih baik, lancar, transparan, dan akuntabel, (3) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPDB secara terpusat dan mudah, dan (4) mendorong peningkatan penguasaan teknologi informasi kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

Pendaftaran daring ini lebih menguntungkan, masyarakat tidak perlu antri, dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Masyarakat dapat memantau dari rumah. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara *online* atau *offline*. Online itu, masyarakat melakukan sendiri, sementara kalau offline masyarakat ke sekolah yang dituju dan kemudian akan dibantu untuk proses daringnya. Ini alternatif bagi masyarakat yang terkendala atau tidak memahami pendaftaran daring⁴⁷.

Pendapat hampir senada juga dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Pendaftaran daring membuat pendaftaran lebih mudah dan praktis, selain itu juga transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi. Pendaftaran daring ini harapannya pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Proses pendaftaran juga runtut sesuai alur, sehingga tertib⁴⁸.

Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan banyak kelebihan dari pendaftaran daring, seperti kemudahan dan kepraktisan dalam mendaftar dan memantau jurnal harian. Orangtua tidak perlu datang ke sekolah, namun cukup melihat perkembangannya di <https://ppd.semarangkota.go.id/smp>. Sementara kendala dari pendaftaran daring adalah server tidak bisa diakses sehingga menimbulkan kekhawatiran. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Memang lebih mudah dan praktis. Di situsnya juga terdapat informasi yang jelas, jadi kita memang lebih mudah. Kita bisa dapat informasi tentang sekolah, daya tampung, zona mana

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

saja benar-benar praktis bagi saya yang memang tidak banyak waktu. Masalahnya ya itu server tiba-tiba nggak bisa diakses, waduuuh itu benar-benar bikin khawatir⁴⁹.

Kendala server dalam pendaftaran daring di SMPN 27 Semarang pada PPDB TA 2019/2020 juga dikemukakan oleh Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Tidak bisa diakses, padahal itu hari terakhir PPDB. Saya ingin melihat peringkat anak saya diurutan ke berapa, kira-kira masuk kuota atau tidak? Ini tidak bisa dilihat, jadi bingung. Akhirnya saya berinisiatif datang ke SMPN 27 Semarang mencari solusi⁵⁰.

Selain kendala server, pendaftaran PPDB di SMPN 27 Semarang pada TA 2019/2020 adalah kebingungan orangtua calon peserta didik mengenai pendaftaran jalur prestasi dalam zonasi dan zona. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Ada beberapa orangtua yang bingung mendaftar melalui jalur prestasi dalam zonasi dan zonasi. Masih banyak orangtua yang belum mengetahui sistem penerimaan, seperti ketika mendaftar di jalur zonasi dan siswa tidak tertampung maka akan dilemparkan ke jalur prestasi dalam zonasi⁵¹.

Pendapat hampir senada juga dikemukakan oleh Ibu Indartik selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

bahwa terdapat orangtua calon peserta didik yang belum memahami sistem penerimaan sehingga mengalami kebingungan saat proses mendaftar. Pendapat ini terlihat dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Sedikit kendala di PPDB 2019/2020 adalah orangtua belum mengetahui dan mungkin paham sistem penerimaan bagaimana. Ya, kami memberikan penjelasan kepada mereka dan kemudian mendampingi mereka saat mendaftar, harapannya mereka paham dan tidak keliru. Jumlahnya, cukup lumayanlah⁵².

Berdasarkan penjabaran di atas tampak bahwa pendaftaran PPDB pada sistem zonasi di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dilakukan dengan mekanisme daring karena beberapa kelebihan yang dimiliki seperti kemudahan, kepraktisan, transparan, dan mudah monitoring untuk jurnal harian. Meski demikian pendaftaran daring ini memiliki kendala berupa *server* yang tiba-tiba tidak bisa diakses, serta pengetahuan dan pemahaman yang rendah dari orangtua calon peserta didik mengenai sistem penerimaan.

e. Biaya Pendaftaran PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 tidak dikenakan biaya pendaftaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Tidak ada biaya pendaftaran alias

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

gratis”⁵³. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara “gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran”⁵⁴. Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan tidak adanya biaya pendaftaran di SMPN 27 Semarang⁵⁵.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SMPN 27 Semarang tidak memungut biaya Pendaftaran PPDB. Masyarakat gratis untuk mendaftarkan sekolah di SMP tersebut.

f. Persyaratan PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

Persyaratan PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengacu pada Perwali Kota Semarang 15/2019, yaitu:

- 1) *Foto copy* akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru
- 2) *Foto copy* ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan dengan ijazah SD/ ijazah Program Paket A/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SD
- 3) *Foto copy* SHUSBN SD atau bentuk lain yang sederajat

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

- 4) *Foto copy* KK terhitung paling singkat 6 (enam) bulan tinggal di daerah sebelum pelaksanaan PPDB
- 5) Membawa piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan
- 6) Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas
- 7) Surat keterangan peserta didik berkebutuhan khusus dalam zona dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari dokter serta psikolog

Permasalahan yang muncul terkait persyaratan ini adalah dompleng KK (menitipkan nama anaknya ke KK orang yang beralamat dalam zona sekolah yang dituju) dan memanfaatkan SKD (Surat Keterangan Domisili). Kasus ini memang sedikit dan lebih banyak dijumpai di sekolah-sekolah favorit. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Adanya orangtua calon murid menggunakan KK dompleng atau SKD. Tujuannya supaya calon murid dapat diterima. Biasanya dompleng KK saudara. Di SMP kami ada, Cuma sedikit sekali, namun kalau di sekolah-sekolah yang difavoritkan ya pastinya banyak⁵⁶.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

Kendala persyaratan PPDB saat ini yang paling banyak penyalahgunaan KK. PPDB tahun ini menggunakan KK untuk mengetahui domisili siswa dengan tujuan mencegah potensi terjadinya mutasi dadakan saat PPDB. Modus yang muncul saat ini dompleng KK atau memalsukan SKD.... Biasanya penyalahgunaan KK atau SKD banyak ditemukan di sekolah-sekolah favorit⁵⁷.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Memang ada akal-akalan orangtua supaya anaknya masuk zona. Ada yang anaknya dimasukkan KK saudara yang alamatnya berada dalam zona, atau kadang pakai SKD. Iya lihat sendiri ada”⁵⁸.

Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan adanya penyalahgunaan KK dalam PPDB dengan sistem zonasi. Pernyataan tersebut ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Ada mas, menggunakan KK orang lain. Yang saya tahu, biasanya 6-12 bulan sebelum pendaftaran, anaknya dimasukan ke KK saudaranya... lha kan minimal 6 bulan mas, jadi begitu caranya”⁵⁹. Fathir yang merupakan SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan adanya penyalahgunaan KK dalam PPDB dengan sistem zonasi, yang ditunjukkan dalam

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

kutipan hasil wawancaranya sebagai berikut: “iya ada... *dompleng* KK keluarga saudaranya atau neneknya”⁶⁰.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SMPN 27 Semarang menetapkan persyaratan PPDB 2019/2020 sesuai dengan Perwali Kota Semarang 15/2019. Kendala yang muncul adalah penyalahgunaan KK atau SKD meskipun jumlahnya sangat kecil.

g. Kriteria PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020

Kriteria penerimaan calon peserta didik di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu:

- 1) NZ (Nilai Zonasi), jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan tinggal di daerah zona SMPN 27 Semarang sebelum pelaksanaan PPDB;
- 2) NUSBN (Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional) atau bentuk lain yang sederajat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam yang tertuang dalam SHUSBN (Sertipikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional) calon peserta didik
- 3) NP (Nilai Prestasi), di bidang akademik yang mencakup olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok yang diperoleh siswa

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Fathir, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

- 4) NL (Nilai Lingkungan), nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar SMPN 27 Semarang dalam Z1 dibuktikan dengan KK
- 5) NAP (Nilai Akhir Peringkat) merupakan penjumlahan NZ, NUSBN atau bentuk lain yang sederajat, NP dan NL
- 6) Apabila terdapat nilai peringkat yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) Jarak tempat tinggal peserta didik
 - b) Usia calon peserta didik yang lebih tua
 - c) Pilihan pertama
 - d) Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA
 - e) Urutan awal pendaftaran

Kriteria skor PPDB di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menurut Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang adalah tergantung pada kondisi yang ada, meski demikian untuk awalnya menggunakan proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Untuk kriteria skor penerimaan, tergantung dengan kondisi di lapangan. Dasarnya kami adalah kuota siswa dan peringkat nilai dari siswa yang mendaftar. Skor tertinggi menunjukkan skor tertinggi dari siswa yang daftar. Skor terendah berarti skor terendah dari siswa yang daftar. Diurutkan dari skor tertinggi sampai terendah, kalau kuota sudah terpenuhi (disinikan kan 256), berarti skor peringkat ke-256 berarti skor yang paling rendah. Kalau misal, skor

sama ya kami menggunakan pedoman yang ada, (1) alamat, (2) umur, (3) pilihan sekolah, (4) nilai tertinggi dari Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dan (5) awal mendaftar⁶¹.

Sementara Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengungkapkan bahwa kriteria PPDB sebagai berikut:

Ya nilai total anak masuk dalam kuota sekolah. Makanya kita mesti pantau jurnal supaya tahu nilai anak kita akan lolos atau tidak. Setahu saya, yang penting rumahnya masuk zona dan umurnya memenuhi syarat sudah aman. Wong ada yang nilainya tinggi tidak masuk karena tidak masuk zona kalau tidak umurnya tidak cukup⁶².

Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan bahwa sistem zonasi sekolah cenderung memprioritaskan anak yang dekat rumah dibandingkan nilai. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Kalau aku sih pahamnya namaku tetap tercantum di jurnal. Yang penting rumah dekat sekolah (masuk zona). Umur harus masuk. Nilai tinggi, masuk zona, umur tidak cukup tetap tidak diterima. Apalagi SMP ini peminatnya banyak”⁶³.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria penerimaan calon peserta didik di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu jumlah nilai zonasi, nilai

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁶³ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

prestasi dan nilai lingkungan atau yang dikenal dengan nilai akhir peringkat. Meski demikian, jika memiliki nilai yang sama maka siswa yang diterima diterima dengan menggunakan pertimbangan utama dalam zona baru kemudian umur.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Zonasi Sekolah di SMPN 27 Semarang

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Peraturan ini ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan layanan pendidikan, khususnya PPDB dengan sistem zonasi. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan pedoman kepala daerah dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan sistem zonasi sekolah, serta pedoman kepala sekolah melaksanakan PPDB (Pasal 3 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018).

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di Kota Semarang mengacu pada peraturan di atas ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP atau sederajat, khususnya berkaitan dengan sistem zonasi. Selanjutnya peraturan wali kota ini menjadi petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di sekolah-sekolah yang berada di Kota Semarang, termasuk SMPN 27 Semarang. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah

SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Zonasi sekolah untuk 2019/2020 mengacu pada Permendikbud 51/2018 dan Perwalkot 15/2019. Perwalkot ini mengatur rinci pelaksanaan sistem zonasi, seperti maksud dan tujuan, penyelenggaraan dan tata caranya, seleksi dan kriteria penerimaan siswa, pengaduan⁶⁴.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Indartik selaku Guru SMPN 27 Semarang yang juga menjadi panitia PPDB sebagai berikut: “semua yang berkaitan dengan PPDB semuanya mengacu pada permendikbud yang berlaku”⁶⁵. Sabarudin Hulu selaku Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah juga mengatakan: “Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 telah mengatur jalur pelaksanaan penerimaan siswa didik yaitu 90% melalui jalur zonasi, 5% prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua”⁶⁶.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 27 Semarang memiliki dasar hukum yang jelas dan petunjuk teknis. Kedua hal ini diharapkan pelaksanaan sistem zonasi berjalan dengan baik, lancar, dan sederhana dengan menekankan pada asas keadilan dan keterbukaan (Pasal 3 huruf c Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019).

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁶⁶ Unit Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, 2019, Ombudsman Jateng Awasi PPDB Tingkat SMP di Kota Semarang, Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-jateng-awasi-ppdb-tingkat-smp-di-kota-semarang-zonasi-untuk-pemerataan-pendidikan>

Pada pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 yang menjadi pertimbangan pertama adalah zonasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang bahwa ketika terdapat calon siswa yang memiliki NAP sama maka yang dijadikan pertimbangan pertama adalah nilai zona. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Memang ada calon murid yang tidak diterima meski berasal dari dalam zona, karena kuota sudah terpenuhi. Dasar kami menolak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 1. Jarak, 2. Usia, 3. Pilihan pertama, 4. NAP, dan 5. Nomor urut saat daftar⁶⁷.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengungkapkan bahwa penerimaan siswa dipengaruhi oleh daerah zonasi. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Setahu saya, yang penting rumahnya masuk zona dan umurnya memenuhi syarat sudah aman. Wong ada yang nilainya tinggi tidak masuk karena tidak masuk zona kalau tidak umurnya tidak cukup”⁶⁸.

Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan bahwa sistem zonasi sekolah cenderung memprioritaskan anak yang dekat rumah dibandingkan nilai. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Yang penting rumah dekat sekolah (masuk zona). Umur harus masuk. Nilai

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

tinggi, masuk zona, umur tidak cukup tetap tidak diterima. Apalagi SMP ini peminatnya banyak”⁶⁹.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di SMPN 27 Semarang terkait kriteria penerimaan siswa cenderung menekankan daerah zonasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa nilai zonasi menjadi urutan pertama sebagai kriteria penerimaan calon siswa, bahkan ketika ada calon siswa yang memiliki nilai akhir peringkat yang sama maka diputuskan dengan melihat daerah zonasi. Baru ketika daerah zonasi juga sama dilihat kriteria umur.

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang juga ditunjukkan dengan jumlah penerimaan siswa sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh SK Walikota Semarang 420/404 Tahun 2019, yaitu 256 orang dengan jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 32 orang. Jumlah siswa yang diterima adalah 253 orang (98,83%) berasal dari zona 1 (Z1) dan 3 orang (1,17%) berasal dari jalur mutasi. Jadi, untuk PPDB TA 2019/2020 di SMPN 27 Semarang tidak menerima siswa yang berasal dari zona 2 (Z2), jalur prestasi, atau inklusi. Alasan yang dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang karena kuota, calon siswa tidak ada yang menggunakan jalur prestasi atau inklusi, serta siswa yang gagal diterima karena nilainya NAP tidak masuk kriteria. Untuk NAP pada PPDB TA 2019/2020 adalah minimal 76,10. Kutipan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

hasil wawancara dengan Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27

Semarang:

TA 2019/2020 memang ada calon siswa yang tidak diterima karena faktor nilainya tidak cukup, meski mereka berasal dari dalam zona. Jadi, kuota sudah terpenuhi maka anak-anak yang tidak diterima diluar peringkat yang ada dalam jurnal. Perlu diingat kami hanya menerima 256... pas kebetulan untuk TA 2019/2020 tidak ada yang menggunakan jalur prestasi atau inklusi. Yang ada jalur mutasi.

Nilai Akhir Peringkat (NAP) rendah yang menjadi alasan tidak diterimanya calon siswa di SMPN 27 Semarang juga dikemukakan oleh Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 bahwa teman anaknya tidak diterima di SMPN 27 Semarang karena nilainya rendah meskipun berasal dari dalam zona. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Teman anak saya, Agnes tidak diterima di SMP 27 karena nilainya nggak masuk, memang rendah sih. Padahal tinggalnya dalam zona, ya akhirnya anaknya masuk swasta”⁷⁰.

Dimas selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020 juga mengemukakan bahwa ada temannya SD yang tidak diterima di SMPN 27 Semarang karena nilainya rendah, meski berasal dari dalam zona. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Tidak selalu yang berasal dari dalam zonasi diterima, buktinya temanku Ari tidak diterima karena nilainya rendah. Kan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

yang diterima cuma 256 jadi kalau sudah terpenuhi dan namanya tidak masuk jurnal (nilai tidak masuk), pastinya tidak diterima”⁷¹.

Fathir selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020 juga mengemukakan bahwa tidak semua calon siswa yang berasal dari dalam zona akan diterima di SMPN 27 Semarang. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Tidak selalu kalau berasal dari dalam zona aman, karena ada kuota. Memang yang penting zona, umur, yang kemudian nilai”⁷².

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zona menjadi dasar utama penerimaan siswa, namun dalam pelaksanaannya tidak semua calon siswa yang berasal dari dalam zona diterima di SMPN 27 Semarang. Hal ini disebabkan adanya kuota. Apabila jumlah kuota terpenuhi, maka calon siswa yang nilai akhir peringkat tidak memenuhi nilai minimum yang ada dalam jurnal sekolah maka diterima. Adapun penetapan kuota ini sudah sesuai dengan SK Walikota Semarang 420/404 Tahun 2019, dengan tujuan mendorong penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas.

Segi lain penerimaan jumlah siswa di SMPN 27 Semarang yang sesuai dengan kuota berarti mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti sesuai dengan salah satu tujuan penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di SMPN 27 Semarang, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Indartik

⁷¹ Hasil wawancara dengan Dimas, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁷² Hasil wawancara dengan Fathir, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “*Alhamdulillah* seperti tahun-tahun sebelumnya jumlah siswa yang diterima di SMP 27 mencapai target. Artinya masyarakat menerima kami dengan baik”⁷³.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020 yang menyatakan bahwa SMPN 27 Semarang tidak kekurangan siswa. Jadi kalau mau mendaftar di SMPN 27 Semarang selain berada dalam zona, juga tetap memperhatikan umur dan nilai. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Kalau saya sih SMP 27 bagus, buktinya tidak pernah kekurangan siswa, bahkan banyak siswa yang tidak diterima. Makanya kalau mau masuk di SMP 27 tidak bisa hanya mengandalkan zona dan umur, nilai tetap harus diperhatikan. Syukur-syukur pakai jalur prestasi, itu akan lebih mudah⁷⁴.

Pendaftaran PPDB pada sistem zonasi di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dilakukan dengan mekanisme daring (dalam jaringan) karena beberapa kelebihan yang dimiliki seperti kemudahan, kepraktisan, transparan, dan mudah monitoring untuk jurnal harian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut:

Pendaftaran daring ini lebih menguntungkan, masyarakat tidak perlu antri, dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Masyarakat dapat memantau dari rumah. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara *online* atau *offline*. Online itu, masyarakat melakukan sendiri, sementara kalau offline masyarakat ke sekolah

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

yang dituju dan kemudian akan dibantu untuk proses daringnya. Ini alternatif bagi masyarakat yang terkendala atau tidak memahami pendaftaran daring⁷⁵.

Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang juga mengemukakan bahwa pendaftaran pada sistem zonasi sekolah menggunakan sistem daring. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Pendaftaran daring membuat pendaftaran lebih mudah dan praktis, selain itu juga transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi. Pendaftaran daring ini harapannya pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Proses pendaftaran juga runtut sesuai alur, sehingga tertib⁷⁶.

Siswa dan orangtunya juga mengemukakan hal yang senada bahwa pendaftaran di SMPN 27 Semarang menggunakan sistem daring. Hal ini sebagai ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara dengan Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 yang menyatakan: “iya pendaftarannya *online*. Lebih mudah sih”⁷⁷. Fathir yang juga siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan: “daftarnya pakai *online*”⁷⁸. Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan hal senada bahwa pendaftaran sistem zonasi sekolah menggunakan sistem daring. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Iya pakai daring. Kalau

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Fathir, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

menurut saya banyak kelebihan. Lebih mudah, praktis, terus pemantauan jurnal harian juga lebih gampang dan praktis. Kita orangtua tidak perlu datang ke sekolah, cukup lihat di *web*”⁷⁹.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran siswa baru di SMPN 27 Semarang terkait sistem zonasi sekolah menggunakan sistem daring. Sistem pendaftaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 5 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)

SMPN 27 Semarang tidak memungut biaya Pendaftaran PPDB. Masyarakat gratis untuk mendaftarkan sekolah di SMP tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis”⁸⁰. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara “gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran”⁸¹. Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan tidak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

adanya biaya pendaftaran di SMPN 27 Semarang⁸². Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menyatakan: “gratis, tidak ada biaya daftar”⁸³. Fathir yang juga siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan: “daftarnya gratis”⁸⁴.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran siswa baru di SMPN 27 Semarang terkait sistem zonasi sekolah tidak ada biaya pendaftaran (pendaftaran gratis). Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 33 ayat (2) Permendikbud 51/2018 yang berbunyi:

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB

Berdasarkan penjabaran di atas, maka pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan (1) memiliki dasar hukum yang jelas dan petunjuk teknis, nilai zona menjadi kriteria pertama penerimaan siswa, (2) jumlah siswa yang diterima sesuai kuota, memenuhi target, dan peraturan yang berlaku. Siswa yang diterima 253 orang (98,83%) berasal dari dalam zona (Z1) dan 3 orang (1,17%) berasal dari jalur mutasi, (3) pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya (gratis).

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁸³ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Fathir, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

2. Pelaksanaan Sistem Zonasi Sekolah di SMPN 27 Semarang terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan dan HAM Serta Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Pemberlakuan sistem zonasi sekolah oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap bagus sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang sebagai berikut: “dari sudut pandang pendidikan, kebijakan zonasi bagus karena untuk memudahkan akses masyarakat dalam bersekolah. Masyarakat bisa bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya”⁸⁵. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa “salah satu tujuan sistem zonasi meningkatkan akses”⁸⁶.

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang mampu meningkatkan akses pendidikan, yang ditunjukkan dengan masyarakat yang berada dalam zona SMPN 27 Semarang memperoleh prioritas untuk diterima. Pada PPDB TA 2019/2020 di SMPN 27 Semarang, jumlah siswa yang diterima sesuai dengan kuota (256 orang), dengan rincian dari jalur zona sebanyak 253 orang (98,83%) (standarnya: minimal 90%) dan jalur mutasi sebanyak 3 orang (1,17%) (standarnya: maksimal 5%).

Keuntungan sistem zonasi sekolah ini antara lain menghemat waktu dan biaya untuk bersekolah, karena siswa bersekolah di dekat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 bahwa sisi positif dari sistem zonasi sekolah adalah dapat menghemat uang saku dan biaya transportasi. Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai berikut:

Sisi positif dari zonasi, kita dapat menghemat uang saku dan biaya transportasi. Karena rumah saya dekat, anak bisa naik sepeda sendiri atau jalan kaki karena memang tidak ada 1 km. Kalau ada kegiatan ekstra, anak dapat pulang dulu ke rumah untuk makan dan artinya juga hemat uang saku. Itu sih yang saya tahu⁸⁷.

Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan bahwa sistem zonasi memiliki sisi positif, seperti waktu anak tidak habis untuk perjalanan karena jarak sekolah dekat serta hemat biaya transportasi dan uang saku. Hal ini dinyatakan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Kalau anak sekolah dekat rumah memang ada untungnya. Waktu tidak habis di jalan. Sampai di sekolah masih fresh. Pengeluaran untuk transportasi sama jajan juga berkurang. Misal di Gojek-an ongkosnya kan lebih murah. Anak bisa pulang dulu pas ekstra untuk makan⁸⁸.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang mampu meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat dalam zonasi, serta hemat waktu perjalanan, hemat biaya transportasi dan hemat uang saku sekolah. Hasil ini mendukung temuan Azizah Arifina Safarah dan Udik Budi Wibowo

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

(2018) bahwa zonasi sekolah menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia⁸⁹.

Segi lain, inti dari sistem zonasi ialah sekolah hanya boleh menerima siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah yang dibatasi, tetapi siswa juga dibatasi untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Siswa tidak lagi bebas memilih sekolah sesuai keinginan, tetapi harus yang dekat dengan sekolahnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan PPDB sistem zonasi sekolah, khususnya non diskriminatif dan berkeadilan (Pasal 2 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2014). Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Hasil wawancara dengan Dimas selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 memperkuat pernyataan bahwa sistem zonasi sekolah bertentangan dengan prinsip non diskriminatif dan berkeadilan. Kutipan hasil wawancara dengan Dimas sebagai berikut: “Tidak adil, saya ingin masuk SMP 2 dan gagal bukan nilai tapi zonasi dan umur. Kecewa”⁹⁰.

Ari yang juga siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengungkapkan hal senada, bahwa sistem zonasi tidak adil karena

⁸⁹ Azizah Arifinna Safarah dan Udik Budi Wibowo, 2018, Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia, *Lentera Pendidikan*, 21(2):206-213. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/206-213/5892

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Dimas, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

membatasi pilihan sekolah dan lokasi sekolah pun tetap berada dalam zona. Kutipan hasil wawancara dengan Ari sebagai berikut: “Benar tidak adil. Jumlah sekolah yang kita pilih dibatasi, ini kan namanya tidak bebas. Sekolah yang dipilih pun berada dalam zona”⁹¹.

Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengemukakan bahwa sistem zonasi sekolah tidak adil buat anak-anak. Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Wibowo sebagai berikut:

Tidak adil dan sebaiknya dicabut. Kasihan anak-anak tidak bebas untuk memilih sekolah yang diharapkan. Tidak semua sekolah memiliki kualitas yang baik dan zonasi ini memungkinkan anak-anak tidak memperoleh pendidikan berkualitas karena tinggal di lingkungan yang ternyata mutu sekolahnya bagus sedikit. Memang faktanya mutu sekolah tidak rata kok.

Sistem zonasi sekolah bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dan berkeadilan, juga dikemukakan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana bahwa penerapan zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama-ratakan. Selain itu, juga untuk mempermudah calon peserta didik untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Namun dalam faktanya hal ini belum terwujud karena belum meratanya kualitas sekolah. Selain itu, kapasitas kuota dari sekolah di setiap zona juga belum merata. Artinya, setiap zona memiliki jumlah siswa yang tidak sama dan seringkali tidak sebanding dengan kursi yang tersedia di sekolah yang berada di

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ari, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

zona. Misalnya, Zona A memiliki kapasitas kursi 300 padahal jumlah siswa hanya 200 (ternyata kelebihan kursi); sementara Zona B memiliki kapasitas kursi 300 padahal jumlah siswa 600 (kekurangan kursi)⁹².

Pendapat Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana tersebut, didukung oleh Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengungkapkan bahwa kuota 5% untuk jalur prestasi justru menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan bagi kelompok anak-anak cerdas. Anak-anak tersebut cenderung sulit memperoleh sekolah yang diharapkan karena sekolah yang dipilih tidak berada dalam zona dan ketika menggunakan jalur prestasi kuotanya sangat minim. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut: “Ya saya kurang setuju dengan zonasi. Jatah anak pinter terlalu sedikit, cuma 5%, kasihan anak-anak yang pinter. Mereka belajarnya *tenanan*, tapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena tidak masuk zona. Ini tidak adil buat mereka”⁹³.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penerapan kuota 5% untuk jalur prestasi pada sistem zonasi sekolah tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminatif dan berkeadilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Bertentangan juga dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

⁹² Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, 2018, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237/21244>

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Selain itu, juga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang walaupun dapat melindungi hak-hak anak atas pendidikan memang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah, serta memberi keuntungan terkait penghematan waktu perjalanan ke sekolah, biaya transportasi dan uang saku sekolah; namun juga tidak sesuai dengan prinsip non diskriminatif dan berkeadilan karena masyarakat dibatasi dalam memilih sekolah dan menghambat anak memperoleh pendidikan bermutu, karena di Indonesia sendiri untuk yang sekarang ini kualitas mutu pendidikan di sekolah sama sekali belum merata ditambah guru guru yang mempunyai kualitas bagus kebanyakan hanya terpusat di sekolah negeri favorit seharusnya disebar keberadaanya dengan demikian mutu tenaga pendidikan kurang lebih setara selain guru, fasilitas sekolah yang masih timpang menjadi penyebab pemerataan belum terwujud Dengan demikian, pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang belum melindungi hak-hak anak atas pendidikan.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sistem Zonasi Sekolah di SMPN 27 Semarang untuk Memenuhi Hak-Hak Anak Atas Pendidikan

a. Faktor Pendukung

1) Regulasi

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sistem zonasi sekolah di Kota Semarang, termasuk di SMPN 27 Semarang. Kedua hal ini diharapkan pelaksanaan sistem zonasi berjalan dengan baik, lancar, dan sederhana dengan menekankan pada asas keadilan dan keterbukaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Zonasi sekolah untuk 2019/2020 mengacu pada Permendikbud 51/2018 dan Perwalkot 15/2019. Perwalkot ini mengatur rinci pelaksanaan sistem zonasi, seperti maksud dan tujuan, penyelenggaraan dan tata caranya, seleksi dan kriteria penerimaan siswa, pengaduan⁹⁴.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Indartik selaku Guru SMPN 27 Semarang yang juga menjadi panitia PPDB bahwa: “semua yang berkaitan dengan PPDB semuanya mengacu pada

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

permendikbud yang berlaku”⁹⁵. Sabarudin Hulu selaku Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah juga mengatakan: “Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 telah mengatur jalur pelaksanaan penerimaan siswa didik yaitu 90% melalui jalur zonasi, 5% prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua”⁹⁶.

Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan adanya dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil: “Setahu saya kan zonasi memang ditetapkan oleh pemerintah, permendikbud. Ya berarti dasar hukumnya jelas”⁹⁷. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 bahwa: “zonasi ini kan aturan Permendikbud”⁹⁸.

Berdasarkan penjabaran di atas, adanya dasar hukum yang jelas dan juga petunjuk teknis akan mendorong pelaksanaan sistem zonasi sekolah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

SMPN 27 Semarang membentuk panitia PPDB TA 2019/2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

⁹⁶ Unit Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, 2019, Ombudsman Jateng Awasi PPDB Tingkat SMP di Kota Semarang, Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-jateng-awasi-ppdb-tingkat-smp-di-kota-semarang-zonasi-untuk-pemerataan-pendidikan>

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

pembentukan panitia ini adalah pelaksanaan PPDB TA 2019/2020 berjalan dengan lancar. Pada dasarnya semua guru di SMPN 27 Semarang dapat menjadi panitia, namun jika tahun sebelumnya sudah menjadi panitia maka tahun ini akan diganti oleh guru lain. Harapannya agar semua guru memiliki pengalaman menjadi panitia. Selain itu, untuk pelaksanaan PPDB TA 2019/2020 juga melibatkan siswa SMPN 27 Semarang yang tujuannya selain memberi pengalaman bagi siswa juga memberikan suasana yang akrab antara calon pendaftar (orangtua dan calon siswa) dengan lingkungan sekolah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Iya untuk pelaksanaan PPDB memang kami membentuk panitia. Tujuannya supaya koordinasi mudah dan lancar, proses pendaftaran lancar. Untuk panitia sendiri kami libatkan guru-guru, staf, bahkan murid. Semuanya terlibat. Biasanya untuk panitia yang tahun sebelumnya sudah ya ini menjadi bantu saja. Harapannya semua orang-orang di sekolah ini merasakan menjadi panitia. Kalau murid kami libatkan supaya tercipta kondisi yang akrab. Orangtua calon siswa dan calon siswa dapat bertanya atau cari informasi dari murid-murid sini⁹⁹.

Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan bahwa terdapat panitia PPDB di SMPN 27 Semarang, bahkan murid-murid pun dilibatkan. Hal tersebut membuat orangtua calon siswa lebih mudah untuk

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

memahami alur dan syarat pendaftaran karena apabila ada yang tidak jelas maka mengetahui kemana harus dituju. Kutipan hasil wawancara dengan Ibu Miriam sebagai berikut:

Iya ada petugasnya (panitia). Orangnya baik-baik dan ramah, bahkan ada muridnya. Waktu saya bingung, murid-murid tersebut langsung membantu saya, mereka ramah-ramah. Waktu itu saya bingung daftar *online* bagaimana, terus sama mereka saya dibantu. Saya senang”¹⁰⁰.

Selanjutnya supaya pelaksanaan PPDB TA 2019/2020 di SMPN 27 Semarang maka kepala sekolah menyelenggarakan beberapa rapat dengan anggota panitia supaya nantinya dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Selain itu, panitia juga mendapatkan pelatihan dan pengarahan supaya terdapat kesamaan pemahaman dan tindakan saat pelaksanaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan wawancara sebagai berikut: “Iya kami membentuk panitia. Sebelum hari pelaksanaan, kami mengadakan beberapa rapat dan pelatihan supaya nantinya ada kesamaan pemahaman dan pelaksanaan berjalan lancar”¹⁰¹. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu Indartik selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang sebagai berikut:

SMP 27 memiliki panitia PPDB yang tujuannya kegiatan PPDB berjalan lancar. Penanggung jawab bapak kepek.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

Panitia juga beberapa kali menyelenggarakan pertemuan dan mengikuti pelatihan, supaya bisa menghadapi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan dengan baik¹⁰².

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa pelaksanaan PPDB di SMPN 27 Semarang pada TA 2019/2020 berjalan dengan baik karena adanya panitia PPDB yang sebelumnya telah mendapatkan arahan dan pelatihan supaya dapat mengatasi kendala-kendala yang mungkin ditemukan saat pelaksanaan. Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB ini juga dilibatkan murid-murid SMPN 27 Semarang dengan tujuan membantu orangtua calon siswa atau calon siswa yang mengalami kesulitan mendaftar dan memberikan informasi yang berhubungan dengan pembelajaran di SMPN 27 Semarang.

3) Sarana dan Prasarana

Pendaftaran PPDB TA 2019/2020 meski dilakukan secara daring, namun tetap terdapat orangtua calon siswa dan calon siswa yang mendaftarnya di sekolah. Oleh karena itu, SMPN 27 Semarang tetap menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya seperti komputer. Untukantisipasi antrian panjang, maka pihak sekolah SMPN 27 Semarang membuka 10 loket. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Indartik selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

27 Semarang sebagai berikut: “Kami membuka 10 loket pendaftaran supaya tidak terjadi banyak antrian. Meski bisa dilakukan dirumah, namun tetap orangtua yang mengambil dan mendaftar *online* lewat SMP 27 juga banyak sekali”¹⁰³.

Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan bahwa banyak orangtua calon siswa yang memilih mendaftar *online* langsung di SMPN 27 Semarang dengan harapan kalau ada yang tidak jelas bisa tahu mengatasinya karena ada pihak sekolah yang membantu. Kutipan hasil wawancara dengan Ibu Nana sebagai berikut: “Iya dan banyak orangtua lainnya yang milih daftar *online* di sekolah (SMP 27) karena takut salah atau tidak *mudeng*. Misal kenapa-kenapa langsung tanya sama panitia, jadi cepat”¹⁰⁴.

Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan hal senada, bahwa meski pendaftaran tidak harus dilakukan di sekolah (karena daring), namun tetap banyak orangtua yang melakukannya di sekolah. Hal tersebut memungkinkan terjadi antrian, namun untungnya pihak SMPN 27 Semarang telah melakukan antisipasi dengan membuka banyak loket pendaftaran. Selain itu, dengan adanya murid-murid yang dilibatkan maka jumlah tenaga yang membantu orangtua

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

calon siswa yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran menjadi memadai. Kutipan hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik sebagai berikut: “Untungnya loket pendaftaran di SMP 27 banyak, jadi tidak banyak antrian. Murid-murid SMP 27 juga banyak bantu, mereka langsung bantu ketika ada orangtua yang bingung atau sulit saat daftar”¹⁰⁵.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa jumlah loket pendaftaran yang banyak dan perangkat pendaftaran lainnya (seperti komputer) menjadi faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran PPDB TA 2019/2020 di SMPN 27 Semarang.

b. Faktor Penghambat

1) Regulasi

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menetapkan kuota sebesar 5% untuk jalur prestasi dianggap tidak memenuhi hak-hak anak (kategori siswa cerdas) untuk memperoleh akses pendidikan yang luas. Hal ini menimbulkan kontra pada masyarakat terkait kebijakan sistem zonasi sekolah, bahkan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa “penerapan zonasi untuk jalur prestasi yang hanya 5 persen

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

memberikan hambatan bagi banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri untuk masuk sekolah yang diinginkan”¹⁰⁶.

Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang juga mengungkapkan adanya pro-kontra kebijakan zonasi sekolah yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Umar sebagai berikut:

Zonasi menimbulkan pro-kontra, terutama kaitannya dengan kecilnya kuota jalur prestasi. Masyarakat beranggapan peraturan ini tidak menghargai kerja keras anak-anak. Pihak lain, zonasi bagus untuk menghilangkan label sekolah favorit. Pro-kontra ini kalau tidak ditanggapi bijaksana sama pemerintah dapat menghambat tujuan zonasi ini sendiri¹⁰⁷.

Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 mengungkapkan bahwa jumlah kuota 5% untuk jalur prestasi merupakan peraturan yang merugikan anak-anak yang pintar. Kutipan hasil wawancara Ibu Nana sebagai berikut:

Ya saya kurang setuju dengan zonasi. Jatah anak pinter terlalu sedikit, cuma 5%, kasihan anak-anak yang pinter. Mereka belajarnya *tenanan*, tapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena tidak masuk zona. Ini tidak adil buat mereka¹⁰⁸.

Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan hal senada bahwa sistem zonasi sekolah sebaiknya dihapus. Peraturan tersebut dianggap merugikan

¹⁰⁶ Bayu Wicaksono, *Op Cit*

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

buat anak-anak yang berprestasi, mengingat kecilnya kuota untuk jalur prestasi. Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Wibowo sebagai berikut:

Aturan zonasi sebaiknya dicabut saja, dikembalikan seperti semula pakai nilai NEM. Itu lebih adil. Kalau kualitas sekolah sama tidak *pa-pa, wong* kondisi sekolah saat ini belum sama. Sekolah yang bagus sedikit dan belum tentu ada buat anak-anak yang pintar. Menurut saya lebih baik aturan ini dicabut¹⁰⁹.

Tri Mulyani dan Dewi Tuti Muryati dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru” mengungkapkan bahwa kebijakan sistem zonasi dapat meningkatkan akses pendidikan bagi calon peserta didik dan pemerataan pendidikan. Sisi lain, kebijakan sistem zonasi juga menyebabkan calon peserta didik tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapatkan penghargaan¹¹⁰.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa kuota maksimal 5% untuk jalur prestasi dianggap tidak tepat atau merugikan anak-anak. Hal ini juga menimbulkan pro-kontra mengenai sistem zonasi sekolah, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah.

2) Masih kuatnya persepsi mengenai sekolah favorit di masyarakat

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

¹¹⁰ Tri Mulyani dan Dewi Tuti Muryati, 2020, Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, *Jurnal USM Law Review*, 3(1):34-58. <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2118/1500>

Persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit masih kuat, sehingga banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya di sekolah favorit meskipun hal tersebut di luar zonasi. Hal ini menyebabkan beberapa SMP favorit menerima jumlah pendaftar yang melebihi batas kuota yang ada meskipun baru hari pendaftaran yang pertama dan kedua, sementara di SMP yang tidak favorit terjadi kekurangan siswa¹¹¹. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Label sekolah favorit masih kuat di masyarakat. Sekolah favorit dianggap lebih berkualitas, sehingga masyarakat tetap memilih sekolah-sekolah favorit, bahkan kadang-kadang mengakali untuk masuk sekolah favorit. Misalnya dompleng KK atau bikin SKD yang alamatnya satu zona dengan sekolah favorit yang diincar¹¹².

Ibu Nana selaku orangtua siswa di SMPN 27 Semarang menyatakan keberatannya mengenai sistem zonasi sekolah dan hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Sistem zonasi menyulitkan anak-anak yang pintar (nilai bagus) ditolak masuk sekolah favorit karena rumahnya tidak dalam zona. Sistem ini tidak adil dan menjadikan nilai UN tidak ada artinya. Memang *mending* tidak *usah* ada UN¹¹³.

¹¹¹ Chandra Iswinarno, 2019, Hari Kedua PPDB SMP Kota Semarang, Sekolah Favorit Over Kuota Pendaftar. Suara Jawa Tengah, 14 Juni. <https://jateng.suara.com/read/2019/06/14/204753/hari-kedua-ppdb-smp-kota-semarang-sekolah-favorit-over-kuota-pendaftar?page=2>

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

Bapak Wibowo selaku orangtua siswa di SMPN 27 Semarang juga menyatakan keberatannya mengenai sistem zonasi sekolah dan hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Sebaiknya kebijakan ini dicabut karena memang pemerintah harus mengakui kualitas sekolah di negeri ini tidak sama. Sekolah yang berkualitas ya itu sekolah-sekolah favorit. Sekolah favorit memiliki sarana prasarana yang menunjang, sementara sekolah yang tidak favorit, biasanya sarana prasarana kurang. Guru-gurunya pun juga tidak sama. Maka wajar dong kalau kita orangtua mengharapkan anak kita masuk sekolah “favorit”. Cuma karena sistem zona, akhirnya banyak anak-anak kita yang pintar, nilainya bagus-bagus tidak bisa masuk sekolah tersebut karena tidak satu zona.

Dimas selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan kekecewaannya dengan sistem zonasi sekolah. Dimas yang awalnya ingin masuk ke SMPN 2 Semarang harus memupus harapannya karena di luar zona dan umurnya juga tidak mencukupi. Dimas juga sulit menggunakan jalur prestasi karena minimnya kuota. Oleh karenanya, Dimas kemudian mendaftar di SMPN 27 Semarang. Kutipan hasil wawancara Dimas sebagai berikut: “Ya tidak suka saja sama zonasi. Saya tidak bisa masuk ke SMP yang saya inginkan karena kendala zona, umur, dan kuota jalur prestasi”¹¹⁴.

Penjabaran di atas memperlihatkan masih adanya dikotomi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit yang masih berkembang

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Dimas, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

di masyarakat. Persepsi tersebut muncul karena sekolah favorit dianggap memiliki kelebihan dibandingkan sekolah tidak favorit, seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Kelebihan-kelebihan tersebut oleh masyarakat diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang memengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan sistem zonasi sekolah menimbulkan kekhawatiran di pihak orangtua, apalagi bila anaknya memiliki nilai akademis tinggi¹¹⁵. Jadi, masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa kualitas sekolah belum merata, sehingga masih memiliki harapan anaknya bisa masuk ke sekolah favorit, meskipun sekolah tersebut di luar zona¹¹⁶.

3) Masyarakat belum paham dengan sistem pendaftaran *online*

Pendaftaran pada sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menggunakan sistem daring dan permasalahannya masih banyak orangtua yang tidak mengetahui cara mendaftar secara *online* akhirnya beranggapan bahwa sistem zonasi sekolah merupakan sistem yang rumit. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

¹¹⁵ Dinar Wahyuni, *Op Cit*, hlm.15

¹¹⁶ Dian Purwanti, Ira Irawati, dan Josy Adiwisastara, *Op Cit*

Awalnya saya bingung, maklum saya tidak pernah daftar *online* dan memang awam. Jengkel karena harus scan ini-itu mondar mandir ke rental untuk *scan* dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Untungnya panitia baik, sabar mau membimbing. Tapi jujur mas, rumit dan *capek*¹¹⁷.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 yang juga menyatakan bahwa sistem pendaftaran *online* sulit dan rumit. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya *gaptek* mas, jadi daftar *online* ya bingung. Saya suruh anaknya yang daftar, namun ya bingung, ya sudah saya akhirnya ke sekolah dan minta tolong sama pak guru. Terus yang ribet itu dokumen-dokumen harus di-*scan*, nah kita cari tempat scan dulu, terus balik lagi ke sekolah. Saya tidak paham *scan* pakai hp atau gimana mas. Masalah scan selesai, bingung masukan file ke sistem, ha..ha..ha..¹¹⁸.

Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan bahwa sistem pendaftaran *online* termasuk sulit karena dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan harus di-*scan*, sementara dirinya belum tahu bagaimana caranya men-*scan*. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Ya bingung, kan belum paham *scan* itu bagaimana. Orangtua juga tidak paham. Akhirnya pergi ke rental minta tolong di-*scan*. Saya juga minta tolong mas nya rental untuk daftar online kok, lha bingung dan di rumah tidak ada yang mengajari¹¹⁹.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Miriam selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa sistem pendaftaran *online* oleh sebagian masyarakat dianggap sulit karena belum pernah tahu caranya. Sebagian masyarakat tersebut tidak tahu bagaimana scan dokumen atau merubahnya menjadi *softfile* dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke sistem pendaftaran. Hal ini menyebabkan masyarakat minta tolong ke orang lain (rental) atau sekolah (panitia).

- 4) Gangguan sistem teknologi informasi dan jaringan internet tidak stabil

Pendaftaran pada sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menggunakan sistem daring dan permasalahan yang sering timbul adalah server tidak bisa diakses. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Joko selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Masalahnya ya itu *server* tiba-tiba tidak bisa diakses, *waduuuh* itu benar-benar bikin khawatir”¹²⁰.

Ibu Sri Hartatik selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan bahwa server menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Tidak bisa diakses, padahal itu hari terakhir PPDB. Saya ingin melihat peringkat anak saya diurutan ke berapa, kira-kira masuk kuota atau tidak? Ini tidak bisa dilihat, jadi

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Joko, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

bingung. Akhirnya saya berinisiatif datang ke SMPN 27 Semarang mencari solusi¹²¹.

Sekar selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga menyatakan bahwa *server* dan jaringan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Saat daftar *online* yang nyebelin itu sistem tiba-tiba tidak bisa diakses, atau signal kita buruk. Aduh, bikin *parno* banget. Apalagi kalau orangtua jadi panik. Semakin *nyebelin*”¹²².

Selain Sekar, Helmi yang juga siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 menyatakan bahwa *server* dan jaringan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Hal ini diungkapkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “kendala yang utamanya sih internet. Sering *loss*, sulit diakses, ya seperti itu”¹²³.

Penjabaran di atas memperlihatkan bahwa gangguan sistem teknologi informasi (*server* tidak bisa diakses) dan jaringan internet tidak stabil menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi orangtua dan calon siswa karena mengganggu proses mereka dalam memonitoring posisi di sekolah yang didaftar.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹²² Hasil wawancara dengan Sekar, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹²³ Hasil wawancara dengan Helmi, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

5) Masyarakat belum memahami sistem zonasi sekolah

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tujuan penerapan zonasi sekolah, seperti memudahkan jarak siswa menuju sekolah dan pemerataan pendidikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sutarto selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut: “penerapan sistem zonasi untuk sekarang, tiap zona ada di beberapa kelurahan. Ini diharapkan siswa lebih dekat, tidak terlambat, tidak capek, jadi lebih efisien belajar”¹²⁴.

Masyarakat juga masih ada yang keliru dalam memahami arti zonasi, sehingga menimbulkan konflik saat pendaftaran di sekolah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Indartik selaku panitia PPDB di SMPN 27 Semarang sebagai berikut:

Ada banyak orangtua murid yang salah mengartikan pengertian sistem zonasi karena yang dekat dengan sekolah belum tentu masuk zonasi. Pengertian sistem zonasi di masyarakat dengan aturan yang ada berbeda. Karena tidak semua yang dekat dengan sekolah masuk zonasi dan masyarakat sering salah mengartikan. Ini kadang yang buat orangtua waktu mendaftar komplain¹²⁵.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Ya jengkel, orang-orang pada bilang kalau zonasi itu dekat rumah. Namun *pas* saya mau daftar ke sekolah X tidak bisa

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2020

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Indartik, selaku Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 di SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

karena termasuk tidak masuk zona padahal dekat *lo*. ya terus akhirnya daftar ke SMP ini. Setelah diberi penjelasan sama sekolah, akhirnya *dong*, ya sudah anak saya daftarkan di SMP 27 dan diterima¹²⁶.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak bahwa masih ada masyarakat yang belum paham dengan sistem zonasi sekolah. Masyarakat tersebut bahwa zonasi sekolah identik dengan sekolah dekat rumah. Hal ini yang kadang menimbulkan kesalahpahaman dalam mendaftar sekolah.

6) Turunnya motivasi siswa

Sistem zonasi sekolah lebih mempertimbangkan faktor jarak dibandingkan nilai UN dan hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang sebagai berikut:

Kelemahan sistem zonasi, motivasi siswa turun. Anak-anak kurang semangat untuk bersanng karena punya pikiran “*ngapain susah-susah to nanti walaupun jelek saya bisa masuk SMP A. Walau pun nilai saya jelek, saya bisa masuk SMP B bisa juga masuk SMP C, karena rumah saya dekat situ*”¹²⁷.

Lebih lanjut Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SMPN 27

Semarang juga menyatakan:

Nah ini justru saya kasihan, anak yang punya semangat tinggi, punya semangat sekolah tinggi kebentur zonasi, akhirnya turun. Yah tidak semua, namun ada lah dan menurut saya cukup banyak. Kalau orangtua tidak bisa

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

memotivasi ke anak-anaknya, *down* lah ini anak. “Ngapain saya sekolah sulit-sulit, toh nanti jatuhnya saya di SMP A karena zona saya”. Terjadi kesenjangan anak/ diskriminasi. Anak yang nilainya rendah diterima karena zonasi sedangkan ada anak yang masuk karena nilai bagus... ini akan terjadi kesenjangan. Jadi orangtua sering beranggapan ini tidak adil¹²⁸.

Ibu Nana selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Anak-anak menjadi malas belajar. Mereka beranggapan zonasi lebih penting daripada nilai”¹²⁹. Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan adanya penurunan motivasi belajar pada anaknya yang kedua (anak yang masuk ke SMPN 27 Semarang), sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “Anak yang kedua ini (yang masuk ke SMP 27) santainya *pol*. Kalau diingatkan belajar karena mau ujian, jawabnya santai pa, *wong* pakai zonasi. *Hadeeeeh*”¹³⁰.

Fathir selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 juga mengungkapkan bahwa dirinya santai saat ujian nasional karena faktor zonasi. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan hasil

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Umar, selaku Kepala Sekolah SMPN 27 Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nana, selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo selaku orangtua siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 16 Februari 2020

wawancara sebagai berikut: “Santai sih mas, pakai zonasi jadi santai. Kan zonasi lebih utama dibandingkan nilai”¹³¹.

Dimas selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 yang merasa dirugikan dengan sistem zonasi sekolah (tidak bisa masuk SMP 2) menyatakan motivasi belajarnya turun. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut: “buat apa belajar terus, santai saja, kan tetap zona kok”¹³².

Berdasarkan penjabaran di atas tampak bahwa sistem zonasi sekolah telah menurunkan sebagian motivasi belajar pada siswa. Para siswa tersebut beranggapan bahwa yang lebih penting masuk dalam zona, sementara nilai hanya pendukung.

Berdasarkan penjabaran di atas tampak bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan. Faktor pendukung mencakup: (1) Regulasi. Terdapat dasar hukum yang jelas dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan sistem zonasi; (2) SDM. Terdapat panitia PPDB yang telah mendapatkan arahan dan pelatihan; dan (3) Sarana dan Prasarana. Tersedianya loket pendaftaran dalam jumlah yang memadai dan didukung perangkat pendaftaran lainnya (komputer). Faktor penghambat mencakup: (1) Regulasi. Minimnya kuota jalur prestasi; (2) Masih kuatnya persepsi mengenai sekolah favorit di

¹³¹ Hasil wawancara dengan Fathir, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

¹³² Hasil wawancara dengan Dimas, selaku siswa SMPN 27 Semarang TA 2019/2020 pada tanggal 15 Februari 2020

masyarakat; (3) Masih adanya masyarakat yang belum paham dengan sistem pendaftaran *online*; (4) Gangguan sistem teknologi informasi (server tidak bisa diakses) dan jaringan internet tidak stabil; (5) Masih adanya masyarakat yang belum memahami sistem zonasi sekolah; (6) Turunnya motivasi belajar siswa.

